

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Hak Imunitas Advokat

1. Pengertian Advokat dan Ketentuan tentang Advokat

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Advokat Nomina (kata benda) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, pengacara sedangkan menurut *English Language Dictionary*, Advokat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan.

Advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur oleh undang-undang advokat.⁵ Pengertian advokat adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang

⁵ *Ibid.*, hlm. 3

berlaku.⁶ Perkataan “Advocaat” semula berasal dari bahasa latin yaitu “advocatus” mengandung arti yaitu seseorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk ber-acara dalam hukum.⁷ Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum, artinya bahwa di dalam kedudukan sebagai penegak hukum, secara normatif Advokat dituntut tidak hanya membela kepentingan hukum kliennya, tetapi adalah dalam rangka *law enforcement*. Norma atau yang sering disebut kaidah merupakan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, yang ketentuan itu mengikat setiap orang dalam lingkungan tersebut yang artinya semua orang dalam lingkungan tersebut harus menaati norma yang berlaku. Dibalik ketentuan dalam norma itu terdapat nilai yang menjadi landasan tingkah laku manusia.

Berikut macam-macam norma:

- 1) Norma Kesusilaan yaitu merupakan pelengkap kehidupan pribadi manusia mencegahnya dari kegelisaan diri sendiri yang mana ditunjukkan agar terbentuk akhlak yang baik pada diri manusia. Kaedah ini membebaskan kewajiban bagi manusia, ditunjukkan pada sikap batin.

⁶ <http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-advokat-menurut-bahasa-dan.html> diakses Kamis 8 Maret 2018, pukul 15.56

⁷ Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta hlm. 32.

Sanksi datang dari dalam diri sendiri, seperti merasa bersalah atau gelisah.

- 2) Norma Kesopanan yaitu norma yang berdasarkan kepada kebiasaan, kepatutan, dan seharusnya dilakukan dalam masyarakat, yang ditunjukkan pada sikap lahir (formal) manusia. Norma atau kaedah ini membebankan kewajiban-kewajiban saja dengan sanksi berupa teguran, cemoohan, dan sebagainya.
- 3) Norma Agama yaitu ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan, yang bertujuan sebagai penyempurnaan manusia agar manusia berbuat baik dan melarang manusia untuk berbuat jahat, dan norma ini bersifat memberikan kewajiban tanpa memberikan hak. Sanksi diberikan oleh Tuhan atas dosa manusia yang melanggar kaedah ini.
- 4) Norma Hukum yaitu peraturan yang diciptakan oleh penguasa negara yang diberi kewenangan untuk itu yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sanksi yang melanggar norma ini bersifat memaksa yang tujuannya untuk membuat pelanggarnya menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi tidak semua norma atau kaedah hukum ini disertai dengan sanksi, keadaan ini disebut dengan istilah *lex imperfecta*.

Penegakan hukum dalam lajur hukum yang diatur oleh norma benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai amanat dari keberadaan

hukum. Profesi Advokat disebut profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*). Kemuliaan dan kehormatan profesi Advokat melekat karena predikat hukum dan sifat profesi itu. Kemuliaan dan kehormatan itu harus dijunjung tinggi tanpa mengenal tempat dan waktu. Menjadi kewajiban luhur Advokat untuk sadar akan kewajibannya untuk menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Kode etik menjadi landasan moralitas ketika Advokat menjalankan profesinya memberi layanan hukum kepada klien.⁸

2. Pengertian Hak Imunitas pada Advokat

Hak imunitas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang persidangan. Hak Imunitas adalah kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan atau mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapa pun dalam melaksanakan tugasnya sehingga advokat tersebut tidak dapat dihukum dalam melaksanakan tugasnya.⁹ Sebagai hak yang sangat istimewa, hak imunitas tidak boleh diberikan untuk sembarang tujuan. Ia diberikan untuk menjaga dan melindungi sesuatu yang sangat istimewa. Ada minimal dua hal yang perlu dilindungi melalui hak imunitas, yaitu peran

⁸ Marudut Tampubolon, 2015, *Membedah Profesi Advokat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm. 46.

⁹ V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 121.

advokat memberi pertimbangan kekuatan dalam proses hukum dan peran menjaga peradilan yang tidak memihak. Hal ini tidak dilindungi oleh imunitas, maka seorang pengacara akan mudah dikriminalisasi dan diintimidasi.

Kekuasaan aparat jika tidak dikontrol, maka penyalahgunaan wewenang terbuka lebar, yang pada ujungnya klien akan mengalami proses hukum yang sewenang-wenang. Itulah filosofi imunitas advokat.¹⁰ Hak Imunitas yang dimiliki oleh profesi Advokat memiliki batasan tertentu. Advokat mempunyai hak menangani berbagai jenis perkara, seperti perdata atau pidana termasuk korupsi demi kepentingan pembelaan kliennya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Bentuk pembelaan yang dimaksud berupa pendampingan atau tindakan lain seperti surat menyurat, mengajukan praperadilan, mengajukan upaya hukum untuk tujuan agar kliennya diperlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.¹¹

3. Sejarah Advokat di Indonesia

Advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditemukan di kota-kota yang memiliki pengadilan negeri dan dewan pengadilan. Para Advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang disebut *Balie van*

¹⁰ Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegak Hukum*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, hlm. 127-128.

¹¹ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5cd64c0dbd8/batasan-hak-imunitas-advokat--begini-pandangan-ahli> diakses Senin 9 Juli, pukul 00.09

*Advocaten*¹². Sebelum Undang-Undang Advokat diundangkan pada Tahun 2003, telah terlebih dahulu diawali dengan bergabungnya 7 organisasi Advokat Indonesia yaitu:

- 1) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Organisasi Profesi Advokat dan Organisasi Perjuangan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November 1985. IKADIN yang pada awalnya dibentuk sebagai satu-satunya wadah bagi Profesi Advokat akhirnya gagal. Penyebab kegagalan salah satunya yaitu terakomodasikan pengacara praktek dalam organisasi IKADIN, adanya perbedaan status antara pengacara dan Advokat yang merupakan perbedaan pandang dalam sistem transformasi kepemimpinan dan mekanisme dalam Organisasi.
- 2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) didirikan pada tanggal 27 juli 1990, oleh dua ratusan anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), yang pada waktu itu sedang mengikuti Musyawarah Nasional (Munas), yang kemudian menyatakan keluar dari Ikadin karena proses pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikadin periode 1990-1994 dinilai telah menyalahi atas Anggaran Dasar (AD).
- 3) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
Sebagai wadah bagi pengacara untuk praktek. Didirikan sebagai akibat pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan yaitu Advokat dan Pengacara praktik.
- 4) Himpunan Advokat atau Pengacara Indonesia (HAPI)
Himpunan Advokat atau Pengacara Indonesia (HAPI) adalah organisasi profesi advokat yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1993 yang diakui secara sah dan terdaftar pada dan Departemen dalam negara Republik Indonesia sejak tahun 1993. Berawal Tahun 1989 IPHI yang berpusat di Surabaya pada waktu itu dipimpin oleh Azizbalmar, SH., mengadakan kongres yang diadakan di Yogyakarta tujuan dari kongres tersebut adalah untuk menyatukan organisasi yang ada tetapi tidak disetujui sehingga organisasi mengalami perpecahan.
- 5) Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
Suatu perkumpulan Advokat yang didirikan untuk dapat mewujudkan peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan yang dijamin oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum serta memberikan advokasi, perlindungan, pembelaan dan pendidikan hukum khususnya bagi masyarakat.
- 6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

¹² V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 7.

AKHI didirikan oleh 16 praktisi hukum dari 9 kantor hukum terbesar Indonesia yang secara nyata telah menjalankan kegiatannya selaku Konsultan Hukum pada tanggal 19 Desember 1998 di Jakarta. AKHI merupakan satu-satunya organisasi Konsultan Hukum.

- 7) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), keduanya ini merupakan satu wadah.¹³

Konsultan Hukum tersebut bersatu dalam suatu himpunan sehingga mempunyai satu dasar pemikiran dalam Hukum Pasar Modal. Selain Organisasi Advokat terdapat juga lembaga Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Ada tiga konsep bantuan hukum yaitu :

1) Konsep Bantuan Hukum Tradisional

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum tradisional ini pasif dan cara pendekatannya sangat formal dan legal, sebagai permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep bantuan hukum tradisional ini merupakan konsep yang lama, yang berfokus terhadap kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapat pembelaan.

¹³ https://www.kompasiana.com/suhardis/pelurusan-sejarah-organisasi-advokat-secara-konstitusional_56f3d13a0123bda9159494b9 diakses Kamis 8 Maret, pukul 16.30

2) Konsep Bantuan Hukum Konstitusional

Bantuan Hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan lebih luas seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum. Sifat konsep bantuan hukum konstitusional ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

3) Konsep Bantuan Hukum Struktural

Kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaanya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik.¹⁴

Konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, dan konsep bantuan hukum struktural sama-sama merupakan pelayanan, yang memberikan pelayanan dibidang hukum untuk membantu permasalahan hukum yg ada masyarakat secara lebih aktif dan mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang ada sehingga menjamin persamaan kedudukan hukum.

¹⁴ Adang dan Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung. hlm. 245-251

4. Kode Etik Advokat

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang artinya kebiasaan. Selain itu etika juga dikenal dengan kata “moral” atau “moralitas” yang berasal dari bahasa latin, yaitu *mos* yang artinya juga kebiasaan¹⁵. Etik yaitu usaha manusia untuk mencari norma yang baik dan buruk , pada intinya etik bisa dikatakan yaitu filsafat tingkah laku atau filsafat mencari pedoman bagaimana manusia bertindak yang baik atau etis. Etik pada dasarnya merupakan pandangan hidup dan tentang sebagaimana manusia harus berlaku, etik juga merupakan penilaian terhadap perbuatan manusia. Hukum dan etik mempunyai dua sisi dari satu mata uang, hukum diciptakan kepada manusia sebagai makhluk sosial, dan etik ditujukan untuk manusia sebagai individu yang artinya hati nuraninyalah yang diketuk. ¹⁶Etika profesi yaitu norma-norma , syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional, yang dalam arti orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang profesional. Didalam ketentuan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 26 ayat (1) untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat. Kode etik profesi pada hakikatnya merupakan sinyal moral dan menjalankan pekerjaan profesinya. Keberadaan kode etik profesi merupakan elemen determinan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan itu termasuk profesi atau bukan. Etika

¹⁵ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Berpikir*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm 15.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo , 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta. hlm. 47

moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, maka akan timbul kejahatan, yakni perbuatan yang tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut sebagai berikut:

- 1) Berkata dan berbuat jujur
- 2) Menghormati orang lain
- 3) Menghargai orang lain
- 4) Membela kebenaran dan keadilan¹⁷

Kode etik profesi juga harus ada unsur kebebasan, hubungan kepercayaan, internal kontrol bagi para Advokat dalam mengabdikan kepentingan umum, objek keilmuan, hak imunitas, dan wajib simpan rahasia.¹⁸ Menurut George Gordon Coughlin mengatakan adanya keterkaitan kode etik profesi dengan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, pengadilan, profesi (hukum), dan kliennya, sejauh mana keberadaan kode etik profesi itu diterapkan dengan konsekuen. Artinya, seberapa jauh kode etik profesi itu ditaati oleh para anggotanya serta seberapa tinggi kadar efektifitas kontrol kelembagaan dari organisasi profesi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi atau malpraktek. Tiap profesi termasuk Advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para

¹⁷ Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 48

¹⁸ Artidjo Alkostar, *Op. Cit.*, hlm. 89-90.

profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari.¹⁹ Kepercayaan dari pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan menjadi sangat penting. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan oleh klien hilang, karena itu klien akan merasakan kepercayaan yang ia berikan itu hilang. Sebab dari itu, Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dulu dari pada kepentingan pribadi Advokat. Kode etik Advokat tidak membenarkan seorang Advokat memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan, Advokat tidak boleh memberikan harapan kepada klien. Advokat boleh menjanjikan bahwa perkaranya akan diurus sebaik-baiknya dengan mengarahkan segala daya kemampuan guna memenangkan perkaranya²⁰. Setiap orang yang menjalankan profesi Advokat wajib tunduk dan memenuhi Kode Etik Profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Taati dan patuh pada ketentuan suatu kode etik bagi Advokat merupakan sikap moral dan kewajiban yang dilandasi dengan penuh rasa kesadaran diri secara sukarela akan tunduk kepadanya. Fungsi Kode Etik Profesi Advokat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kode Etik dalam hubungan dengan kepribadian Advokat umumnya.
- 2) Kode Etik dalam hubungan Advokat dan kliennya.
- 3) Kode Etik dalam hubungan dengan sejawat.
- 4) Kode Etik dalam bertindak menangani perkara

¹⁹ Daniel S. Lev, *Op. Cit.*, hlm. 189.

²⁰ Adang dan Yesmil Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 267.

- 5) Kode Etik dalam hubungan Advokat terhadap hukum atau undang-undang kekuasaan umum, dan para pejabat pengadilan.²¹

B. Profesi Advokat dalam pembelaan klien pada persidangan

1. Peran dan Fungsi Advokat

Peran dan fungsi Advokat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat nomor 18 Tahun 2003. Peran Advokat menurut Soejarno Soekanto seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lainnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan atau status dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan.²²

Advokat sangat dibutuhkan dalam penyelesaian di Pengadilan, karena para advokat mengetahui secara jelas mengenai proses beracara di Pengadilan baik di Pengadilan umum maupun Pengadilan agama. Pembuktian tersebut terlihat sekarang ini seperti timbul banyaknya

²¹ Ropaun Rambe, 2003, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta. hlm. 45.

²² <https://www.scribd.com/doc/151231123/Peranan-Advokat-Dalam-Penegakan-Hukum-Dan-SPP>
diakses Kamis 8 maret, pukul 16.55

lembaga-lembaga bantuan hukum maupun konsultan-konsultan hukum dalam membantu menyelesaikan masalah yang ada, ditambah lagi dengan adanya kewenangan advokat untuk membantu penyelesaian perkara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.²³

Fungsi Advokat antara lain:

- (1) Memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Kode Etik Advokat)
- (2) Turut mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dari bernegara. (penjelasan umum Undang-Undang Advokat)
- (3) Membantu tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. (penjelasan umum Undang-Undang Advokat)

Tugas dan Fungsi Advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus berfungsi sebagai berikut :

- (1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia

²³ <https://www.suduthukum.com/2016/09/peran-dan-fungsi-advokat-dalam-sistem.html> diakses pada Kamis 8 maret, pukul 17.07

- (2)Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum Indonesia
- (3)Melaksanakan Kode Etik Advokat
- (4)Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- (5)Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- (6)Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- (7)Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- (8)Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- (9)Membela kepentingan klien (*litigation*)
- (10)Mewakili klien dimuka pengadilan (*legal representantion*)
- (11) Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. (*legal aid*)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Advokat terikat pada Kode Etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Advokat akan mendapatkan sanksi apabila melakukan pelanggaran.

2. Hak dan Kewajiban Advokat

Pasal 14 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Menurut P.Scholten sistem hukum perdata itu bersifat *subjektief recht* yang artinya hak dan kewajiban dipandang hak saja. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan seseorang atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi yang mana pada seharusnya kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Bebas mengeluarkan pendapat yang dimaksud adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Kebebasan tersebut dan peraturan perundang-

undangan. Fungsi Advokat adalah masalah kewajiban, pada dasarnya kewajiban advokat merupakan kewajiban profesi yang bersifat otonom. Hak Advokat yaitu tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya dengan adanya unsur kemerdekaan dengan adanya unsur imunitas antara lain:

- 1) Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Dalam menjalankan profesinya Advokat berhak memperoleh data, informasi atau dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan di Undang-Undang.

Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang bebas. Konsekuensinya profesi Advokat memiliki suatu standard nilai dan norma yang dilahirkan dan ditetapkan dari kalangan profesi itu sendiri. Salah satu kewajiban pokok Advokat sebagai pemberi

bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya, dan menjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah, dan cepat.²⁴ Advokat dalam menjalankan pekerjaan memiliki empat kewajiban dan kesetiaan yang harus selalu dijunjung tinggi dalam menjalankan pekerjaannya, yakni:

- 1) Kesetiaan yang ada pada masyarakat, dimana honorarium hanya sesuatu yang tidak penting dan Advokat dapat mencapai kehormatan tertinggi tanpa mengumpulkan uang banyak.
- 2) Kesetiaan yang ada pada peradilan, yaitu dengan sikap yang tulus, kejujuran dan dapat dipercaya, atas dasar orientasi kepada penegak kebenaran.
- 3) Kesetiaan yang ada pada klien, dalam posisi ini Advokat merupakan tempat berlindung dan tempat yang terpercaya. Advokat menjadi tempat berbagi yang meneduhkan jiwa dengan pendampingan perkaranya.
- 4) Kesetiaan pada teman-teman sejawat, dimaksudkan dengan sikap yang jujur dan memegang teguh janji. Seorang Advokat yang baik menghindari cara-cara yang tidak patut seperti serobot menyerobot Klien, mencari-cari perkara, dan lain sebagainya.²⁵

²⁴ Daniel S. Lev, 2001, *Advokat Indonesia mencari Legitimasi*, Penerbit Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, hlm. 94-95

²⁵ Marudut Tampubolon, *Op. Cit.*, hlm. 142

3. Pembelaan dalam penyelesaian pelanggaran Advokat

Nota pembelaan atau pleidoi yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu upaya terakhir dari terdakwa atau pembela terdakwa untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya, sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara pidana. Nota pembelaan ini bisa dibuat dan disampaikan secara mandiri oleh terdakwa atau diwakilkan kepada Penasehat Hukum atau Advokat yang diberi kuasa.

Pembelaan atau pleidoi bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukuman pidana ringan-ringannya.²⁶ Pleidoi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal dengan istilah pembelaan. Menurut Subekti, kata pleidoi berasal dari bahasa Belanda, yaitu Pleidooi yang artinya pembelaan. Pleidoi atau pembelaan merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa atau pembela dalam rangka mempertahankan hak-hak dari kliennya, membela kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

4. Pemeriksaan pada Persidangan

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tentang Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan

²⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pleidoi/> diakses pada Senin 16 April, pukul 9.59

tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara.²⁷ Dalam proses Pengadilan, advokat dapat melakukan keberatan terhadap jalannya persidangan yang menyimpang dari ketentuan. Keberatan itu dapat menyangkut bentuk maupun menyangkut isi.²⁸ Penasihat hukum pada dasarnya berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Tersangka berhak didampingi pada setiap proses pemeriksaan. Proses penyidikan kedudukan penasihat hukum bersifat pasif. Penasihat hukum artinya mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan hanya sebagai penonton.²⁹

Kedudukan Advokat sangat penting dalam sistem penegakan hukum baik dalam perspektif individual, maupun sebagai anggota organisasi profesi.

²⁷ Fajar Ari Sudewo, 2005, “*Peran Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Portal Garuda, Sosekhum, hlm. 8.

²⁸ *Ibid*, hlm. 136.

²⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592b7f5ff264e/batasan-peran-penasihat-hukum>

Di dalam posisinya sebagai pribadi atau sebagai individu, Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Dalam hal bermasyarakat, Advokat itu bernaung pada organisasi. Sebagai bagian dari organisasi profesi di bidang hukum, organisasi profesi Advokat dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Organisasi profesi merupakan satu-satunya adalah profesi yang diakui Undang-Undang. Hal ini bukan berarti membatasi. Namun sepanjang kewenangan dari negara untuk mengatur, maka naungan organisasi ini dipandang ini dipandang sebagai bentuk pengaturan negara terhadap profesi Advokat.³⁰

C. Analisis Hak Imunitas Advokat dalam pembelaan klien dalam Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor : 101/Pid.B/2007/PN.Psr)

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu bahwa terdakwa yang berinisial MA bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa yang berinisial S. Pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2005. Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja, mencegah, merintangi atau mengagagalkan suatu perbuatan yang dilakukan seorang pegawai negeri itu. Dalam menjalankan suatu peraturan undang-undang, perbuatan mana dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya penyidik dari Polresta Pasuruan yang bernama Hendra Trio Wijaya telah menangani perkara pidana

³⁰ Marudut Tampubolon, *Op. Cit.*, hlm. 47.

penggelapan yang dilakukan oleh Munip dengan objek Sertifikat Hak Milik No. 94, Kel. Sebani, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan atas nama Subakti yang saat itu sertifikat berada di tangan terdakwa A. Pada tanggal 3 Desember 2005 Hendra dan Denny selaku penyidik mendatangi rumah terdakwa A, dengan membawa surat perintah penyitaan barang bukti, namun Hendra dan Denny tidak bertemu terdakwa A, akan tetapi bertemu dengan kedua anaknya, kemudian penyidik menunjukkan surat perintah penyitaan dan penetapan ijin penyitaan barang bukti Sertifikat Hak Milik No. 94 atas nama Subakti. Serta menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan penyidik tersebut akan tetapi kedua anaknya menolak dengan alasan khawatir sertifikat tersebut dalam persidangan jatuh ketangan pelapor Rudi Harsono, kemudian kedua penyidik tersebut kembali pulang ke Polresta.

Pada tanggal 6 Desember Penyidik mendatangi rumah A untuk mengantarkan surat panggilan dan juga menjelaskan akan melakukan penyitaan sertifikat namun setelah dijelaskan A menolak atau tidak mengijinkan sertfikan no. 94 atas nama Subakti untuk dilakukan penyitaan malah Sertifikat tersebut diserahkan atau dikuasakan kepada S selaku penasehat hukumnya. Atas kejadian tersebut pada tanggal 8 Desember terdakwa S datang ke Sat Reskrim Polresta Pasuruan untuk memenuhi panggilan, kemudian Kasat Reskrim AKP Sunardi Riyono, SH, menjelaskan akan menyita Sertifikat Hak Milik No.94. S tetap tidak mau menyerahkan walaupun sudah dijelaskan, sertifikat tersebut karna setelah diserahkan khawatir dalam persidangan akan jatuh ketangan pelapor Rudi, kemudian

dibuatkan Berita Acara penolakan penyerahan barang bukti Sertifikat Hak Milik No. 94. Tersangka A dan S Menghalang-halangi penyitaan Sertifikat Hak milik No.94 atas nama Subakti dalam perkara Munip.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa MA dan S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ secara bersama-sama dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang keras, yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh Pegawai Negeri yang diwajibkan mengawas-awasi atau Pegawai Negeri yang diwajibkan atau dikuasakan mengusut atau memeriksa tindak pidana atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu pekerjaan yang diusahakan oleh salah satu dari negeri itu, untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, maka S telah terbukti melanggar Pasal 216 KUHP yang dimaksud barang siapa yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya, demikian pula barang siapa dengan sengaja dengan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut dan dilakukan bersama-sama dengan terdakwa 1.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MA dan S masing-masing dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 5 bulan menyatakan barang bukti berupa 1 lembar berita acara penolakan acara penyerahan barang bukti untuk dilakukan penyitaan, 3 lembar fotocopy penetapan penyitaan yang telah dilegalisir, surat putusan dari hakim pengadilan negeri Pasuruan dalam perkara atas nama Muhammad Munip tanggal 15 Maret 2006 yang telah dilegalisir.
- c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

3. Pertimbangan Hakim

- a. Majelis hakim melihat bahwa ada rangkaian sikap batin dari terdakwa I yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II, yang sejak awal berpendirian bahwa sertifikat tanah yang dikuasai oleh terdakwa I adalah sah miliknya dari terdakwa Munip sebagai tersangka dan terdakwa I. Sehingga sudah sejak awal terbangun sikap batin *mens rea* dari terdakwa I dan terdakwa II untuk tidak akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut untuk disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam tersangka Munip, dan terdakwa II dengan sangat yakin menyatakan sertifikat tanah tersebut secara sah adalah milik dari terdakwa I.
- b. Menimbang, karena Majelis Hakim berpendapat laporan polisi tanggal 8 Desember 2005 merupakan rangkaian *mens rea* berupa penolakan penyitaan yang dilakukan oleh terdakwa I sejak awal pemeriksaan dalam

perkara penggelapan sertifikat tanah yang dilakukan oleh tersangka Munip hingga kedatangan penyidik pada tanggal 3 Desember 2005 dan 6 Desember dan penolakan penyitaan itu dilanjutkan oleh terdakwa II untuk tidak menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada penyidik sejak menjadi Kuasa Hukum terdakwa I, dan pada tanggal 14 Desember 2005 terjadi lagi penolakan yang merupakan bagian keseluruhan *mens rea* terdakwa I dan terdakwa II untuk tetap tidak mau menyerahkan sertifikat tanah itu kepada penyidik, sehingga Berita Acara penolakan penyitaan tanggal 14 Desember 2005 itu merupakan bagian dari penolakan yang dilakukan oleh MA dan S yang dituangkan dalam bentuk formalitas yang bertujuan untuk membuktikan adanya penolakan penyitaan oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga penyidik membuktikan penolakan penyitaan sertifikat tanah tersebut memang benar adanya.

- c. Majelis Hakim melihat pandangan yang berlebihan dan keliru dari terdakwa II yang sangat yakin menyatakan sertifikat tanah yang dikuasai oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa I secara sah menurut hukum, apalagi jika dilihat secara keseluruhan dengan mengaitkannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana atas nama tersangka Munip, ternyata ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh tersangka Munip yang berkenaan dengan sertifikat tanah tersebut, dan selanjutnya oleh terdakwa II sebagai seorang advokat yang mengetahui proses hukum pidana maupun perdata, maka terdakwa II mengetahui dengan pasti bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya kepemilikan tanah tersebut adalah melalui persidangan

perkara perdata oleh hakim perdata dan bukan ditentukan oleh terdakwa II sebagai advokat.

- d. Bahwa untuk menentukan apakah alasan yang diajukan oleh terdakwa II tersebut yaitu sertifikat akan jatuh ke tangan saksi pelapor yaitu Rudi Harsono dan alasan Pasal 43 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyitaan surat sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya boleh atas persetujuan mereka atau izin khusus pengadilan negeri setempat dan Pasal 19 ayat (1) yaitu advokat wajib merahasiakan segala sesuatu dari kliennya karena hubungan profesinya dan ayat (2) yang berisi tentang advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan dokumen terhadap penyitaan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yaitu beralasan menurut hukum ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP bahwa dalam rangka penyidikan suatu perkara pidana, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selanjutnya dalam Pasal 39 KUHAP dinyatakan bahwa benda yang dapat disita tersebut adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat dan diperuntukkan melakukan tindak pidana.

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
 6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.
- e. Menurut ketentuan Pasal 42 ayat (1) KUHAP bahwa “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”
- f. Demikian dalam perkara pidana penggelapan sertifikat tanah No. 94 atas nama Subakti yang dikuasai oleh terdakwa I diserahkan kepada penyidik, nantinya akan hilang atau akan disalahgunakan oleh penyidik adalah alasan yang berlebihan dan terlalu dibuat-buat sehingga kekhawatiran tersebut tidak berdasarkan hukum, karena yang menentukan kepada siapa sertifikat tanah tersebut akan dikembalikan adalah saat setelah selesainya persidangan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Majelis Hakim dalam amar putusannya akan menentukan status dari barang bukti tersebut.

4. Putusan Hakim

- a. Menyatakan terdakwa yang berinisial MA dan S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja bersama-sama, merintangi atau menggagalkan proses suatu perkara”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena

Terdakwa I dan terdakwa II dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir.

d. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar berita acara penolakan penyerahan barang bukti untuk dilakukan penyitaan, tertanggal 14 Desember 2005.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy Penetapan Penyitaan Nomor: W.10.d.25.Pi.03.07.161/PN.Psr, tanggal 29 November 2005 yang telah dilegalisir.
3. Putusan pengadilan Negeri Pasuruan, No. 05/Pid.B/2006/PN.Psr., tertanggal 15 Maret 2006, atas nama terdakwa MA.

e. Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Hak Imunitas Advokat terhadap Sugianto

Hak imunitas dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Psr. atas nama terdakwa MA dan S sebagai Kuasa Hukum MA , tidak terdapat hak imunitas yang dapat menjadi alasan pembenar S. Hal tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dinyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam persidangan. Memang setiap

Advokat dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pembelaan klien memiliki hak imunitas yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat tetapi ada batasan hak imunitas tersebut yaitu itikad baik dan dilakukan didalam persidangan. Itikad baik tersebut mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun harus tetap berdasarkan aturan hukum, hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Menurut pendapat penulis putusan tersebut patut dijatuhkan kepada S sebagai advokat profesional dengan kata lain penulis setuju dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dengan alasan dalam Kode Etik Advokat .

Dalam hal ini hak imunitas ini tidak berlaku bagi S sebagai advokat karena melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghalang-halangi tindakan seorang pejabat yang menjalankan ketentuan Undang-Undang, karena didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hak imunitas itu melekat terhadap seorang advokat hanya didalam persidangan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari proses pemeriksaan di pengadilan dengan perkara Nomor 101/Pid.B/2007/PN.Psr. yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang antara lain berupa:

Menurut Pasal 16 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Hak imunitas dimiliki oleh advokat sepanjang beritikad baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Didalam perkara ini tidak dapat diterapkan hak imunitas Advokat karena sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada bahwa imunitas Advokat tidak lagi melekat pada terdakwa, karena Hak imunitas berlaku ketika adanya itikad baik pada Advokat itu sendiri ketika tidak ada itikad baik maka hak imunitas itu tidak berlaku.

Menurut Pasal 43 KUHAP seharusnya yang menyatakan bahwa penyitaan surat dan mereka yang wajib menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat, sedangkan sertifikat tersebut bukanlah dokumen rahasia negara. Dalam perkara ini S sebagai Kuasa Hukum A telah menghalang-halangi penyidik kepolisian yang meminta sertifikat hak milik sebagai barang bukti